



Judul : Stok berlimpah, kenapa harga beras masih tinggi?
Tanggal : Minggu, 31 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Stok Berlimpah, Kenapa Harga Beras Masih Tinggi?

Stok beras dalam negeri disebut-sebut berlimpah. Tetapi harga beras di berbagai daerah masih bergerak fluktuatif. Anomali antara stok dan harga beras menuai komentar beragam dari berbagai kalangan.

Ada yang mempertanyakan stok beras yang ada di mana-mana? Ada juga yang menyinggung mengapa saat cadangan beras pemerintah (CBP) berlimpah, tetapi harga beras mengalami kenaikan? Apalagi, saat ini CBP yang berada di gudang Perum Bulog mencapai 3,9 juta ton.

Menjawab pertanyaan itu, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman seperti dilansir *detikfinance* menduga ada penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah rantai pasok per-berasan. Untuk itu, Pemerintah terus melakukan operasi pasar murah untuk mengintervensi kenaikan harga beras saat ini.

"Ada yang mengatakan, stok kita banyak (beras) tapi kenapa harga naik. Nah ini yang kita selesaikan dengan operasi pasar besar-besaran, kita siapkan 1,3 juta ton (beras)," terang Amran. Lebih lanjut, Amran menjelaskan kasus naiknya harga beras pernah terjadi pada komoditas minyak goreng. Beberapa tahun

lalu Indonesia sempat mengalami kelangkaan minyak goreng hingga kenaikan yang sangat signifikan. Padahal Indonesia merupakan produsen sawit sebagai bahan baku minyak goreng terbesar dunia.

"Ada yang mengatakan, stok banyak kok harga naik. Itu anomali, kenapa? (Sebagai contoh kasus) Kita produsen CPO (*Crude Palm Oil*) terbesar dunia, kita produsen minyak goreng terbesar dunia. Tetapi pernah terjadi di negeri kita, minyak goreng langka. Kalau tidak salah, 3 tahun lalu, 4 tahun langka," katanya.

Untuk menormalkan harga beras, Pemerintah mengencankan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menggelontorkan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Dampaknya, diakui Amran, mulai terlihat. Harga beras mulai mengalami penurunan di 32 provinsi.

Menurut Amran, penurunan terjadi di semua level, baik beras medium maupun premium, seiring gencarnya operasi pasar Pemerintah.

Namun, mengutip data Pusat Informasi dan Harga Pangan Strategis Nasional di laman resmi Bank Indonesia, harga rata-

rata beras memang mengalami penurunan tipis. Harga beras kualitas medium I tercatat sebesar Rp16 ribu per kg per Jumat (29/8/2025), turun tipis dibandingkan harga pada 25 Agustus yang sebesar Rp16.050.

Di periode sama, harga beras kualitas medium II turun Rp100 menjadi Rp15.800 per kg. Adapun untuk beras kualitas super I, harganya juga turun Rp 100 menjadi Rp 17.200 per kg.

Anomali harga beras ini dikeluhkan oleh para pedagang. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ali Mahsun Atmo mengakui dampak dari anomali harga beras para pedagang mengalami kerugian. "Pedagang omsetnya turun," ujar Ali Mahsun.

Sementara, anggota Komisi IV DPR, Firmansoebagyo mengatakan kenaikan harga beras ini karena peredaran beras di lapangan berkurang, sementara permintaan tetap naik. "Terjadi permasalahan distribusi di lapangan," kata Firmansoebagyo.

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Firmansoebagyo dan Ali Mahsun Atmo terkait dengan anomali harga beras, berikut wawancaranya.

FIRMAN SOEBAGYO

Anggota Komisi IV DPR

Jika Bisa Jaga Harga Beras, Rakyat Tenang



Ini bukan sekedar persoalan harga di pasar, tapi menyangkut stabilitas nasional. Jangan sampai Pemerintah mengulang masa lalu.

Stok beras katanya surplus, tapi ternyata harganya naik terus. Apa yang terjadi?

Jadi begini, masalah beras ini kan tergantung mekanisme dalam sistem distribusi. Walaupun di gudang kita ini memiliki stok yang cukup, tetapi kalau tidak didistribusikan ke masyarakat berarti akan terjadi kekosongan pasar.

Nah, kalau kekosongan pasar berarti hukum ekonomi yang jalan yakni *supply demand*. Ketika demandnya tetap ada, *supply*-nya berkurang, kan berarti jadi kenaikan harga.

Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal ini?

Tentu, kita akan berkoordinasi dengan semua pihak guna meredam risiko harga pangan naik. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera mengambil langkah strategis, yaitu menyuntikkan subsidi

langsung kepada masyarakat miskin agar tetap membeli kebutuhan pokok.

Selain itu, memperkuat pengawasan harga di pasar guna mencegah praktik monopoli dan permainan harga serta meningkatkan produksi beras dalam negeri agar tidak bergantung pada impor.

Kalau harga beras bisa dijaga, maka rakyat akan tenang. Tapi kalau harga pangan melonjak, resikonya sangat besar bagi Pemerintahan Prabowo.

Apa dampaknya jika kenaikan harga beras tidak terkendali?

Kenaikan harga beras tidak hanya menekan daya beli masyarakat tetapi bisa memicu gelombang protes publik. Pengalaman Indonesia pada krisis 1997-1998 menjadi contoh nyata bagaimana kenaikan harga pangan berujung pada krisis ekonomi dan politik yang mengguncang Pemerintahan saat ini.

Ini bukan sekedar persoalan harga di pasar, tapi menyangkut stabilitas nasional. Jangan sampai Pemerintah mengulang masa lalu.

Jadi peran distribusi penting untuk menekan harga beras.

Stok beras yang kita punya harus segera didistribusikan kepada masyarakat.

Lalu, apa catatan Anda soal harga beras ini?

Terbatasnya *supply* beras di lapangan itu karena ada kebijakan yang menyulitkan oleh para pedagang. Contohnya, untuk mendistribusikan beras harus menggunakan metodologi atau menggunakan sistem aplikasi. Kalau menggunakan aplikasi, pedagang pasar itu sulit untuk menggunakan aplikasi. Ini kasusnya seperti pupuk ketika menggunakan kartu *e-rek*.

ALI MAHSUN ATMO

Ketum APKLI

Kami Desak Evaluasi Total Anomali Harga



Karena ini soal isi perut ratusan juta rakyat Indonesia. Ini soal roda ekonomi puluhan juta pedagang yang butuh kepastian dari kehadiran negara.

Stok beras kabarnya melimpah tapi harga di lapangan naik. Apa pendapat Anda?

Kami mendesak Pemerintah, DPR dan Presiden Prabowo mengevaluasi total anomali harga beras yang terjadi saat ini. Akibat kenaikan harga beras ini beban hidup rakyat makin berat ditengah daya beli yang belum beranjak naik.

Menko Pangan dan Bulog (Rabu 13/8/2025) tegaskan cadangan beras 3,9 juta ton, namun kenapa harganya naik. Realitas ini adalah sebuah anomali dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama.

Apa dampaknya dari anomali harga beras ini?

Para pedagang turun omsetnya dampak harga beras naik dan tidak stabil.

Kelangkaan beras di pasar tradisional dan ritel modern harus segera

ditanggulangi, karena resikonya terlalu besar.

Menurut Anda, apa penyebab harga beras ini naik. Apakah karena pengekangan hukum beras oplosan?

Pengekangan hukum beras oplosan tidak boleh ganggu stabilitas dan ketersediaan beras di pasar. Tidak boleh membuat sekitar 30 persen pengusaha penggilingan tutup usahanya karena ketakutan. Juga para pedagang sebanyak 80 persen pedagang tutup toko di Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur karena takut.

Apa yang harus dilakukan Pemerintah dan DPR?

Karena ini soal isi perut ratusan juta rakyat Indonesia. Ini soal roda ekonomi puluhan juta pedagang yang butuh kepastian dari kehadiran negara.

Kami mendesak Presiden Prabowo

Subianto evaluasi total adanya anomali harga beras ini. Dan panggil Menko Pangan, Mentan, Kepala Bapanas, Dirut Bulog dan Kapoldi untuk mempertanggungjawabkannya.

Ini sangat mendasar, dan Presiden Prabowo dapatkan data yang dijamin validitasnya bukan asal bapak senang (ABS).

Desakan kepada DPR. Bagaimana?

DPR juga harus melakukan pengawasan di lapangan, jangan sampai masalah beras ini berlarut-larut.

Pemerintah dan DPR mendorong operasi pasar untuk menurunkan harga beras. Apakah efektif?

Tentunya tidak cukup dengan OPM (Operasi Beras Murah). Masalah beras ini banyak yang terlibat dan masalah utamanya bukan kehadiran beras di lapangan saja. **RENEW**